

Akuntansi Terintegrasi Islam : Alternatif Model Dalam Penyusunan Laporan Keuangan

Nasrullah Djamil

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Pekanbaru

*Email : nasrullah.djamil@uin-suska.ac.id

ARTICLE INFO :

Keywords :

*Akuntansi Terintegrasi Islam,
Laporan Keuangan,
Prinsip-Prinsip Syariah,
Etika,
Transparansi,
Keadilan.*

Article History :

Received :2023-01-09

Revised : 2023-02-17

Accepted :2023-03-28

Online :2023-03-30

ABSTRACT

Akuntansi merupakan suatu sistem informasi yang krusial dalam menggambarkan kinerja keuangan suatu entitas. Dalam konteks global yang semakin kompleks dan multikultural, terdapat kebutuhan untuk mengembangkan pendekatan akuntansi yang mencerminkan nilai-nilai dan prinsip-prinsip Islam. Penelitian ini bertujuan untuk mengusulkan alternatif model penyusunan laporan keuangan yang terintegrasi dengan prinsip-prinsip Islam sebagai respons terhadap kebutuhan akan transparansi, etika, dan keadilan dalam pelaporan keuangan. Dengan menggabungkan prinsip-prinsip akuntansi konvensional dengan nilai-nilai Islam, model ini menawarkan kerangka kerja yang holistik untuk menerapkan konsep akuntansi terintegrasi Islam. Model ini mendasarkan penyusunan laporan keuangan pada prinsip-prinsip syariah, termasuk larangan riba, gharar (ketidakpastian yang berlebihan), dan maysir (spekulasi). Selain itu, model ini menekankan pada tanggung jawab sosial dan lingkungan, serta aspek etis dalam pelaporan keuangan. Dalam konteks praktis, penelitian ini mengkaji penerapan model akuntansi terintegrasi Islam dalam berbagai jenis entitas, mulai dari perusahaan skala kecil hingga perusahaan skala besar. Implikasi dari penggunaan model ini terhadap transparansi, keadilan, dan keberlanjutan keuangan dianalisis melalui studi kasus dan perbandingan dengan pendekatan akuntansi konvensional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa model akuntansi terintegrasi Islam ini mampu memberikan pandangan yang lebih komprehensif dan berkelanjutan terhadap kinerja keuangan entitas, dengan mengakomodasi prinsip-prinsip syariah dan nilai-nilai etis. Implikasi dari penelitian ini akan memberikan kontribusi bagi pengembangan praktek akuntansi yang lebih inklusif, berkelanjutan, dan sesuai dengan prinsip-prinsip agama Islam, sehingga memberikan pandangan yang lebih holistik terhadap aspek keuangan dan non-keuangan dalam penyusunan laporan keuangan.

PENDAHULUAN

Benarkah ilmu akuntansi ada dalam Islam? Pertanyaan yang sering muncul dalam benak seseorang. Islam memiliki prinsip-prinsip yang relevan dan spesifik dalam konteks akuntansi. Ini menunjukkan bahwa agama Islam memberikan pedoman dan kerangka kerja untuk praktik akuntansi yang adil, transparan, dan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Islam sebagai agama menyediakan kerangka kerja yang komprehensif untuk kehidupan umatnya, termasuk aspek ekonomi dan keuangan. Dalam Islam, ada konsep-konsep dan prinsip-prinsip yang mengatur tata cara bertransaksi, termasuk dalam konteks akuntansi.

Pada dasarnya, Islam memiliki prinsip-prinsip ekonomi yang adil dan transparan. Praktik akuntansi yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam dikenal sebagai "akuntansi Syariah" atau "akuntansi Islam". Akuntansi



This is an open access article under the [CC BY- SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

Corresponding Author : Nasrullah Djamil

Syariah menekankan pada keadilan, kejujuran, dan transparansi dalam melaksanakan transaksi bisnis dan keuangan.

Al-Qur'an dan hadits-hadits Nabi Muhammad SAW memberikan pedoman yang luas untuk kehidupan umat Muslim, termasuk dalam bidang ekonomi dan keuangan. Meskipun istilah "akuntansi" mungkin tidak secara spesifik disebutkan dalam sumber-sumber tersebut, prinsip-prinsip dan konsep-konsep yang relevan dengan akuntansi dapat ditemukan di dalamnya.

Sebagai contoh, Al-Qur'an menekankan pentingnya kejujuran, keadilan, dan transparansi dalam berurusan dengan orang lain. Ayat-ayat seperti QS : Al-Hujurat (49:13) yang tafsirnya bahwa orang-orang yang beriman harus saling mengenal dan bertindak dengan kejujuran dan adil dalam transaksi mereka. Prinsip-prinsip ini sangat relevan dengan prinsip-prinsip akuntansi yang menekankan integritas, keadilan, dan transparansi.

Selain itu, hadits Nabi Muhammad SAW juga memberikan pedoman praktis dalam berurusan dengan keuangan dan bisnis. Misalnya, hadits yang mendorong transparansi dalam perdagangan dan melarang penipuan atau penyelewengan dalam transaksi. Prinsip-prinsip ini juga mendukung praktik akuntansi yang akurat, jujur, dan terpercaya.

Penting untuk dicatat bahwa ilmu akuntansi sebagai disiplin modern tidak secara khusus dibahas dalam sumber-sumber Islam yang sangat kuno. Namun, nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang mendasari akuntansi, seperti keadilan, kejujuran, transparansi, dan akurasi informasi, dapat ditemukan dan didukung dalam ajaran-ajaran Islam yang lebih luas. Dengan demikian, walaupun tidak ada kutipan langsung yang menyebutkan "ilmu akuntansi" dalam Al-Qur'an atau hadits, konsep-konsep dan prinsip-prinsip yang relevan dengan akuntansi dapat ditemukan dalam sumber-sumber ajaran Islam dan memberikan landasan yang kuat untuk praktik akuntansi yang sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Dalam pandangan Islam, ada keyakinan bahwa kehidupan manusia di dunia ini tidak terbatas pada kehidupan materi dan fana semata. Selain dunia fana (dunia materi yang sementara), ada juga keyakinan akan adanya dunia akhirat yang abadi. Tindakan dan perbuatan seseorang di dunia ini memiliki konsekuensi yang berkelanjutan dan dapat mempengaruhi kehidupan mereka di akhirat.

Dalam Islam, ditegaskan bahwa kehidupan di dunia ini adalah ujian dan persiapan untuk kehidupan akhirat. Setiap perbuatan, baik kebaikan maupun keburukan, akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah SWT pada hari Kiamat. Oleh karena itu, umat Muslim diajak untuk melakukan perbuatan baik, mematuhi ajaran agama, dan menghindari perbuatan dosa.

Goddard, A. (2004) konsep ini mencakup semua aspek kehidupan, termasuk dalam konteks ekonomi dan keuangan. Umat Muslim diminta untuk bertindak dengan kejujuran, adil, dan transparansi dalam setiap transaksi dan bisnis yang mereka lakukan. Mereka juga diingatkan untuk tidak mengejar harta dunia dengan melupakan tujuan akhirat yang lebih penting.

Dalam perspektif ini, prinsip-prinsip akuntansi Islami menjadi relevan, karena mereka mengedepankan nilai-nilai etika Islam dalam pengelolaan keuangan dan bisnis. Transparansi, keadilan, ketelitian, dan kejujuran dalam pelaporan keuangan dianggap sebagai tindakan yang memiliki konsekuensi spiritual di akhirat. Mereka mencerminkan kepatuhan dan tanggung jawab terhadap Allah SWT.

Dengan demikian, dalam pandangan Islam, perbuatan dan tindakan manusia di dunia ini tidak terlepas dari hubungannya dengan kehidupan akhirat. Semua perbuatan memiliki dampak pada dua dunia tersebut, dan keyakinan ini mempengaruhi sikap dan prinsip yang dipegang dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk ekonomi dan akuntansi.

Ibrahim, S. H. M. (2000) ajaran agama Islam perlu diterjemahkan dan ditafsirkan agar dapat diterapkan dalam konteks kehidupan nyata. Agama sebagai "pesan-pesan langit" memang memerlukan pemahaman dan aplikasi yang relevan dengan realitas budaya, politik, dan sosial-ekonomi masyarakat. Agama tidak hanya berada dalam tataran normatif atau teks-teks suci saja, tetapi juga memiliki dimensi praktis yang memengaruhi kehidupan sehari-hari umat. Dalam konteks Islam, terdapat dua sumber utama dalam penafsiran agama: Al-Qur'an sebagai wahyu langsung dari Allah SWT, dan hadits yang berisi perkataan, perbuatan, dan persetujuan Nabi Muhammad SAW. Namun, penafsiran agama tidak terbatas pada aspek normatif semata. Proses penafsiran juga melibatkan kerangka teoritis dan keilmuan yang mempertimbangkan faktor-faktor kontekstual dan kebutuhan zaman.

Dalam upaya membudayakan ajaran agama, para ulama dan cendekiawan Muslim telah mengembangkan ilmu-ilmu keislaman seperti tafsir, fiqh (hukum Islam), dan ushul fiqh (prinsip-prinsip hukum Islam). Melalui studi dan penelitian yang mendalam, mereka berusaha menghubungkan prinsip-prinsip Islam dengan realitas



sosial, ekonomi, dan politik saat ini. Mereka menggunakan metode analisis dan pendekatan kontekstual untuk menghasilkan pemahaman yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

Namun, penting untuk memastikan bahwa dalam upaya membumikan ajaran agama, penafsiran tetap didasarkan pada prinsip-prinsip inti Islam dan nilai-nilai universal yang terkandung dalam ajaran agama tersebut. Memahami konteks dan menerapkan prinsip-prinsip Islam secara kontekstual tidak boleh melanggar nash-nash (teks-teks) yang jelas dan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan dalam agama.

Dalam hal ini, ulama dan cendekiawan Muslim berperan penting dalam menghasilkan penafsiran yang seimbang dan akurat, dengan mengintegrasikan aspek teoritis, keilmuan, dan faktual dalam kerangka nilai-nilai Islam. Dengan cara ini, agama dapat memberikan pedoman dan relevansi dalam tata kehidupan budaya, politik, dan sosial-ekonomi umat Islam tanpa kehilangan esensi dan prinsip-prinsip yang mendasarinya

Dalam QS : Al-Baqarah ayat 282 secara khusus membahas masalah muamalah (transaksi bisnis) dan memberikan petunjuk tentang pentingnya pencatatan yang akurat dan jujur dalam transaksi tersebut. Ayat ini menekankan pentingnya ketelitian dan keadilan dalam mencatat kesepakatan dan utang-piutang antara pihak-pihak yang terlibat.

Ayat tersebut dapat diterjemahkan sebagai berikut:

"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah (berutang) dengan sesama kamu untuk waktu yang telah ditentukan, maka catatlah. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskan dengan benar ketika kamu bermuamalah. Dan janganlah penulis enggan menulis sebagaimana Allah mengajarkannya. Maka hendaklah yang berutang itu menulis, dan hendaklah dia bertaqwa kepada Allah SWT, dan janganlah dia mengurang-ngurangi daripada utangnya itu sesuatu apa pun. Jika yang berutang itu orang yang lemah akal nya atau lemah (kemampuan) menulisnya, atau orang yang tidak mampu, maka hendaklah yang membantu menulis itu berlaku adil. Dan persaksikanlah oleh dua orang saksi dari orang lelaki di antara kamu; jika tidak ada dua orang lelaki, maka seorang lelaki dan dua orang perempuan yang kamu ridhai menjadi saksi-saksi, agar apabila seorang dari keduanya lupa, yang seorang mengingatkan yang lain."

Ayat ini menekankan pentingnya pencatatan yang akurat, ketelitian, dan adil dalam muamalah. Hal ini mencerminkan prinsip-prinsip akuntansi seperti *accountability* (pertanggungjawaban), kepastian, keterbukaan, dan keadilan antara pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi bisnis. Dalam konteks ini, pencatatan yang akurat dan jujur dalam muamalah dianggap sebagai bagian dari tanggung jawab yang harus dipenuhi oleh semua pihak yang terlibat. Hal ini menggarisbawahi pentingnya integritas dan kejujuran dalam pelaporan keuangan dan transaksi bisnis secara umum. Dengan demikian, Surat Al-Baqarah ayat 282 memberikan indikasi bahwa ajaran Islam mendukung praktik akuntansi yang mengedepankan prinsip-prinsip akuntabilitas dan keadilan dalam muamalah atau transaksi bisnis.

KAJIAN LITERATUR

A. Akuntansi Terintegrasi Islam

Djamil (2023) menyatakan bahwa akuntansi terintegrasi Islam adalah pendekatan akuntansi yang didasarkan pada prinsip-prinsip dan nilai-nilai Islam. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa praktik akuntansi sesuai dengan ketentuan agama Islam dan memenuhi standar etika Islam. Beberapa prinsip utama dalam akuntansi Syariah meliputi :

1. **Transparency (Transparansi)** : Informasi keuangan harus disajikan secara jelas, akurat, dan terbuka kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Transparansi ini penting agar semua pihak dapat memahami kondisi keuangan dan hasil transaksi dengan jelas.
2. **Justice (Keadilan)** : Prinsip keadilan harus ditegakkan dalam transaksi dan pelaporan keuangan. Semua pihak yang terlibat dalam transaksi harus diperlakukan secara adil tanpa memanipulasi atau merugikan pihak lain.
3. **Avoidance of Riba (Pencegahan Riba)** : Riba, atau bunga, diharamkan dalam Islam. Oleh karena itu, akuntansi Syariah harus mempertimbangkan alternatif yang sesuai untuk memastikan transaksi keuangan bebas dari unsur riba.
4. **Avoidance of Gharar (Pencegahan Gharar)** : Gharar merujuk pada ketidakpastian yang tidak diinginkan dalam transaksi. Akuntansi Syariah harus memperhatikan pengungkapan informasi yang cukup dan relevan untuk mengurangi ketidakpastian ini.



5. **Zakat and Charity (Zakat dan Sadaqah)** : Akuntansi Syariah juga mempertimbangkan kewajiban zakat dan pentingnya sedekah dalam pengelolaan keuangan. Praktik akuntansi Syariah mencakup perhitungan dan pelaporan zakat serta sedekah secara terpisah.

Baydoun, N. & Willet. (1997) akuntansi Islami juga dapat mencakup aspek lain seperti pelarangan transaksi yang melanggar etika Islam, penghindaran risiko yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah, dan perlindungan hak pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi. Akuntansi Islami dikembangkan untuk memberikan alternatif yang sesuai dengan nilai-nilai Islam dalam konteks keuangan dan bisnis. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa praktik akuntansi mematuhi prinsip-prinsip Islam, menghindari aktivitas yang diharamkan, dan mencapai keadilan dalam pelaporan keuangan dan transaksi bisnis.

Menurut Johari dkk (2016) menyatakan bahwa nilai-nilai Islam perlu diintegrasikan ke dalam pendidikan akuntansi baik dalam mata kuliah etika tunggal maupun terintegrasi atau tertanam dalam mata kuliah lain dalam program tersebut. Integrasi ini akan mampu memperkuat moral internal mahasiswa dan nilai-nilai keislaman yang tertanam kuat dalam diri mereka. Dengan demikian, akan mendukung produk etis universitas untuk mempersiapkan mereka melayani industri dengan lebih baik sesuai syariah.

Kamaruddin dan Sofiah (2019) menyatakan bahwa akuntansi terintegrasi Islam adalah suatu pendekatan dalam praktik akuntansi yang menggabungkan prinsip-prinsip dan nilai-nilai Islam ke dalam proses akuntansi untuk menciptakan keselarasan antara aspek bisnis dan etika agama. Pendekatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa praktik akuntansi tidak hanya mengikuti aturan dan prinsip-prinsip keuangan konvensional, tetapi juga mempertimbangkan nilai-nilai Islam yang meliputi etika, keadilan, transparansi, tanggung jawab sosial, dan ketertiban ekonomi. Dalam akuntansi terintegrasi Islam, unsur-unsur yang biasanya diabaikan oleh akuntansi konvensional, seperti tanggung jawab sosial, dampak lingkungan, dan keadilan dalam transaksi bisnis, diberikan perhatian yang lebih besar.

B. Prinsip-prinsip Akuntansi terintegrasi Islam

Prinsip-prinsip Akuntansi Terintegrasi Islam adalah seperangkat panduan atau nilai-nilai yang membimbing praktik akuntansi agar sejalan dengan prinsip-prinsip Islam dan mempertimbangkan aspek moral, etika, dan keadilan dalam pelaporan keuangan dan operasional bisnis. Beberapa prinsip yang mendasari Akuntansi Terintegrasi Islam meliputi:

1. **Kepatuhan Syariah** : Prinsip ini menekankan pentingnya patuh terhadap hukum dan nilai-nilai syariah Islam, termasuk larangan terhadap riba (bunga), gharar (ketidakpastian yang berlebihan), maysir (spekulasi), dan praktik-praktik yang bertentangan dengan etika Islam.
2. **Transparansi dan Pertanggungjawaban** : Prinsip ini menekankan transparansi dalam pelaporan keuangan dan operasional, serta pertanggungjawaban terhadap semua pemangku kepentingan, termasuk pemilik saham, karyawan, konsumen, dan masyarakat umum.
3. **Keadilan** : Prinsip ini mendorong pembagian keuntungan dan kerugian yang adil dan seimbang antara berbagai pihak yang terlibat dalam bisnis, tanpa eksploitasi atau penindasan.
4. **Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan** : Prinsip ini mengharuskan perusahaan untuk memperhitungkan dampak sosial dan lingkungan dari keputusan bisnisnya, serta melibatkan diri dalam tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) dan praktik bisnis berkelanjutan.
5. **Etika dan Integritas** : Prinsip ini menggarisbawahi perlunya perilaku bisnis yang etis, menghindari benturan kepentingan, dan menjunjung tinggi integritas dalam semua transaksi dan pelaporan.
6. **Keberlanjutan dan Stabilitas Ekonomi** : Prinsip ini menekankan pada praktik bisnis yang berkelanjutan dan keuangan yang stabil, serta menghindari risiko yang tidak terkendali.
7. **Pemberdayaan Ekonomi** : Prinsip ini mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat secara luas, mengurangi kesenjangan sosial, dan memberikan kontribusi positif bagi perkembangan ekonomi umum.
8. **Keseimbangan Spiritual dan Material** : Prinsip ini mengajarkan pentingnya menjaga keseimbangan antara pencapaian material dan spiritual dalam konteks bisnis dan ekonomi.

Prinsip-prinsip ini membentuk kerangka kerja untuk mengembangkan sistem akuntansi yang terintegrasi dengan prinsip-prinsip Islam, menciptakan transparansi, keadilan, dan etika dalam semua aspek bisnis. Akuntansi Terintegrasi Islam bertujuan untuk menjembatani kesenjangan antara keuangan dan moral, serta mendorong praktik bisnis yang lebih holistik dan berkelanjutan dalam masyarakat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam.



METODE

Penelitian ini menerapkan metode tinjauan pustaka (literature review), yang melibatkan tahapan sistematis dalam mengidentifikasi literatur yang telah dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan dari berbagai sumber data sekunder yang relevan dengan topik penelitian. Sekaran, dan Roger Bougie (2017) terdapat tiga tahap utama dalam menggunakan metode tinjauan pustaka ini:

1. Pencarian Literatur Relevan: Tahap awal melibatkan pencarian literatur yang berkaitan dengan tema penelitian. Literatur dari berbagai sumber data sekunder, baik skala internasional maupun nasional, menjadi dasar utama. Teknik pengumpulan data melibatkan pengumpulan buku teks, jurnal ilmiah, disertasi, dokumen konferensi, naskah yang belum dipublikasikan, laporan riset, artikel surat kabar, serta informasi dari internet.
2. Evaluasi Literatur: Setelah literatur terkumpul, tahap evaluasi dilakukan untuk menilai relevansi, kredibilitas, dan kualitas literatur tersebut. Evaluasi ini membantu memastikan bahwa literatur yang digunakan dalam penelitian memiliki landasan yang kuat dan dapat mendukung argumen yang diusung.
3. Penulisan Tinjauan Literatur: Setelah literatur dievaluasi, langkah berikutnya adalah menyusun tinjauan literatur. Pada tahap ini, penulis membaca, mencatat, dan menganalisis isi dari literatur yang relevan. Hasil analisis ini kemudian diintegrasikan dan diorganisir untuk membentuk tulisan artikel yang koheren dan informatif.

Penelitian ini mengandalkan sumber-sumber informasi dari berbagai disiplin ilmu untuk memberikan gambaran yang komprehensif tentang topik yang dibahas. Dengan mengumpulkan, mengevaluasi, dan menyusun literatur dengan cermat, penulis berupaya memberikan pandangan yang mendalam dan berimbang tentang subjek penelitian

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Paradigma Akuntansi Terintegrasi Islam

Menurut pengamatan penulis, sistem akuntansi yang ada di Indonesia sekarang ini terlalu mengadopsi pola pikir barat dengan segala kebudayaannya. Sebagaimana kita maklumi bahwa cukup lama pola pikir dan aktivitas bermuamalah masyarakat muslim di Indonesia khususnya dan selain muslim umumnya mengikuti pola pikir barat tersebut yang mana menekankan pada kapitalisme dan sekularisme.

Dimana paham kapitalisme tersebut lebih menekankan pada prinsip perolehan laba dan keuntungan yang lebih memihak kepada pemilik modal saja tanpa memperhatikan aspek-aspek lain yang sebenarnya lebih memegang peranan penting daripada pemilik modal itu sendiri. Mengapa penulis berpikiran seperti itu, sebagai gambarannya penulis dapat memberikan contohnya sebagai berikut.

- 1. Laba dari hasil penjualan dan produksi yang diperoleh sebuah perusahaan, akan dibagi dalam bentuk deviden. Akan tetapi di dalam pembagian deviden tersebut sepenuhnya hanya untuk pemilik modal saja tanpa memperhatikan kepentingan-kepentingan lainnya seperti pemerintah dan masyarakat.**

Dalam konteks akuntansi Islami, prinsip keadilan dan keberpihakan kepada kepentingan yang lebih luas diperhatikan dalam pembagian laba atau deviden sebuah perusahaan. Konsep pembagian laba dalam Islam mencakup lebih dari hanya pemilik modal, dan memperhatikan kepentingan pemerintah dan masyarakat. Dalam Islam, terdapat konsep kepemilikan bersama (musharakah) dan partisipasi dalam keuntungan dan risiko. Dalam prinsip-prinsip akuntansi Syariah, ada berbagai mekanisme yang dapat digunakan untuk memastikan keadilan dalam pembagian laba.

Antonio, M. Syafi'i, (1999) salah satu mekanisme yang dapat digunakan adalah zakat. Zakat adalah kewajiban bagi umat Muslim untuk memberikan sebagian dari kekayaan mereka kepada kaum yang membutuhkan. Dalam konteks pembagian laba, perusahaan dapat mengalokasikan sebagian dari laba mereka untuk tujuan zakat yang akan diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan.

Ilyas (2001) selain zakat, perusahaan juga dapat mempertimbangkan penggunaan dana sosial atau Corporate Social Responsibility (CSR) untuk memberikan kontribusi positif kepada masyarakat, lingkungan, atau proyek-proyek amal. Ini dapat menjadi bagian dari tanggung jawab sosial perusahaan untuk memperhatikan kepentingan lebih luas di luar pemilik modal. Pemerintah juga dapat berperan dalam mengatur kebijakan pajak dan regulasi yang dapat mempengaruhi pembagian laba. Pajak yang dikenakan kepada perusahaan dapat



digunakan untuk memenuhi kepentingan publik dan pemerintah, seperti pendanaan proyek infrastruktur atau layanan publik.

Dalam praktik akuntansi Islami, penting untuk memperhatikan prinsip keadilan, saling berbagi, dan keseimbangan antara kepentingan pemilik modal, pemerintah, dan masyarakat. Pembagian laba yang adil dan berkeadilan adalah tujuan yang diperjuangkan dalam akuntansi Syariah, dengan mempertimbangkan kepentingan-kepentingan yang lebih luas di dalam masyarakat.

Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam QS : Al-Anbiya ayat 107, yang mana maksud dari ayat tersebut menyatakan bahwa, agar “rahmat” yang dimaksudkan oleh Allah SWT dapat dirasakan dan dinikmati oleh manusia, maka manusia harus menjauhi perbuatan yang saling menzalimi antara manusia satu dengan manusia lainnya, antara manusia dengan lingkungan, antara manusia dengan alam, dan yang lebih penting adalah jangan menzalimi diri sendiri. Hal tersebut lebih dipertegas lagi dalam QS : Al-Baqarah ayat 279, yang mana maksud dari surat tersebut yakni menyatakan tentang prinsip utama dalam syariat Islam terutama dalam melakukan muamalah.

2. Bila dilihat dari kegiatan yang berhubungan dengan perbankan, maka alat ukur yang sering digunakan adalah rate of interest. Hal ini tentu saja menguntungkan bagi perbankan karena perbankan menggunakan instrumen ini untuk mencari-cari alasan untuk menghindari dari mentaati ketentuan-ketentuan syariah.

Penggunaan tingkat bunga (*rate of interest*) dalam kegiatan perbankan adalah riba. Riba (bunga) dianggap sebagai praktik yang diharamkan. Pada perbankan konvensional, bunga sering digunakan sebagai alat pengukur dan penentu keuntungan. Hal ini memang bertentangan dengan prinsip Syariah. Beberapa bank syariah dan lembaga keuangan Islam berupaya untuk menghindari penggunaan bunga dan mengembangkan instrumen keuangan alternatif yang sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah, seperti pembiayaan berbasis bagi hasil dan sukuk (obligasi syariah).

Namun, ada situasi di mana perbankan syariah mungkin terpengaruh oleh praktik-praktik yang mirip dengan bunga konvensional. Ini dapat terjadi dalam bentuk margin keuntungan tetap atau ketidakjelasan dalam struktur transaksi yang menyebabkan kesan yang mirip dengan bunga. Penting untuk memastikan bahwa lembaga keuangan Islam atau perbankan syariah beroperasi dengan jelas sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah dan menghindari praktek yang melanggar ketentuan-ketentuan tersebut. Dewan Pengawas Syariah atau lembaga pengawasan yang setara bertugas untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip Syariah dan menyelesaikan masalah atau pertanyaan yang muncul terkait dengan pematuhan.

Adanya kontrol dan pengawasan yang ketat serta pemahaman yang mendalam tentang prinsip-prinsip Syariah dalam lembaga keuangan Islam penting untuk memastikan bahwa instrumen dan praktik keuangan yang digunakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan syariah dan menerapkan prinsip-prinsip keadilan dan keberpihakan yang sejalan dengan ajaran Islam

Atas dasar pemikiran tersebut diatas, maka penulis merasakan perlunya penerapan akuntansi yang terintegrasi dengan prinsip-prinsip Islam di Indonesia sebagai model alternatif dalam penyusunan laporan keuangan dapat menjadi langkah yang bermanfaat untuk menghindari praktek kecurangan (*fraud*) dalam pelaporan keuangan. Praktek seperti *earning management*, *income smoothing*, *window dressing*, *lapping*, dan teknik-teknik lainnya yang biasa digunakan oleh manajemen perusahaan untuk memanipulasi laporan keuangan dapat memberikan informasi yang tidak akurat atau menyesatkan.

Dalam konteks akuntansi Islam, prinsip-prinsip keadilan, transparansi, dan integritas merupakan bagian integral dari praktik akuntansi. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini dalam penyusunan laporan keuangan, diharapkan dapat mengurangi risiko terjadinya praktek kecurangan.

Lunin (2004) Beberapa langkah yang dapat diambil dalam penerapan akuntansi yang terintegrasi dengan prinsip-prinsip Islam di Indonesia adalah:

1. **Penyusunan Standar Akuntansi Syariah** : Diperlukan upaya untuk mengembangkan dan mengadopsi standar akuntansi yang sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah. Standar ini akan memberikan kerangka kerja yang jelas untuk pelaporan keuangan yang berlandaskan pada keadilan, transparansi, dan integritas.
2. **Pengawasan dan Audit Syariah** : Diperlukan sistem pengawasan dan audit yang kuat yang memastikan bahwa perusahaan menerapkan praktik akuntansi Syariah dengan benar. Dewan Pengawas Syariah atau lembaga pengawasan yang setara dapat memainkan peran penting dalam memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip Syariah.
3. **Pendidikan dan Pelatihan** : Penting untuk memberikan pendidikan dan pelatihan kepada praktisi akuntansi, auditor, dan profesional terkait agar memahami prinsip-prinsip dan praktik akuntansi Syariah.



Hal ini akan memperkuat kemampuan mereka dalam menerapkan akuntansi yang terintegrasi dengan prinsip-prinsip Islam

4. **Kesadaran dan Tanggung Jawab** : Penting bagi manajemen perusahaan, auditor, dan pemangku kepentingan lainnya untuk memiliki kesadaran dan tanggung jawab terhadap pentingnya akuntansi yang terintegrasi dengan prinsip-prinsip Islam. Semua pihak harus berkomitmen untuk menjunjung tinggi integritas, transparansi, dan keadilan dalam pelaporan keuangan.

Dengan menerapkan akuntansi yang terintegrasi dengan prinsip-prinsip Islam, diharapkan dapat menciptakan lingkungan bisnis yang lebih jujur, transparan, dan berkeadilan. Hal ini akan membantu mengurangi risiko praktek kecurangan dan memperkuat kepercayaan para pemangku kepentingan terhadap laporan keuangan yang disajikan oleh perusahaan.

Perlunya penerapan akuntansi yang terintegrasi Islam di Indonesia sebagai model alternatif dalam penyusunan laporan keuangan. Hal ini untuk menghindari terjadinya praktek kecurangan-kecurangan (fraud) seperti *earning management*, *income smoothing*, *window dressing*, *lapping* dan teknik-teknik lainnya yang biasa digunakan oleh manajemen perusahaan dalam penyusunan laporan keuangan. Untuk lebih jelasnya penulis memberikan fenomena terkait dengan laporan keuangan PT, Garuda Indonesia.

Pada konferensi pers bersama Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal 28 Juni 2019, Kementerian Keuangan mengumumkan tindakan disiplin yang diambil terhadap Akuntan Publik Kasner Sirumapea dan Kantor Akuntan Publik (KAP) Tanubrata, Sutanto, Fahmi, Bambang & Rekan karena kesalahan dalam proses audit pada Laporan Keuangan PT Garuda Indonesia Tbk tahun buku 2018. Laporan Keuangan Tahunan Garuda tersebut ternyata tidak akurat setelah ditemukan bahwa Garuda Indonesia telah mencatat pendapatan yang terkait dengan kerjasama dengan PT Mahata Aero Teknologi, padahal pendapatan tersebut harusnya diakui setelah penandatanganan perjanjian. Akibat dari kesalahan ini, Laporan Laba Rugi Garuda terpengaruh, sehingga dua komisaris Garuda menolak menandatangani Laporan Keuangan tahun 2018 tersebut <https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/Siaran-Pers--Otoritas-Jasa-Kuangan-Berikan-Sanksi-Kasus-Pt-Garuda-Indonesia-Persero-Tbk.aspx>.

Setelah itu, Kementerian Keuangan melalui Pusat Pembinaan Profesi Keuangan melakukan pemeriksaan terhadap Akuntan Publik Kasner Sirumapea dan KAP Tanubrata, Sutanto, Fahmi, Bambang & Rekan (sebagai anggota organisasi audit internasional BDO) yang bertanggung jawab atas audit Laporan Keuangan PT Garuda Indonesia Tbk tahun buku 2018. Hasil pemeriksaan tersebut mengungkapkan dua isu penting terkait standar audit dan sistem pengendalian mutu KAP. Kementerian Keuangan menemukan bahwa telah terjadi pelanggaran terhadap Standar Audit (SA) - Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) SA 315, SA 500, dan SA 560 yang dilakukan oleh Auditor dari KAP. Pelanggaran ini berdampak pada opini Laporan Auditor Independen (LAI). SA 315 adalah standar audit yang mengatur tentang pengidentifikasian dan penilaian risiko kesalahan penyajian materi melalui pemahaman atas entitas dan lingkungannya, sementara SA 500 mengatur tentang bukti audit, dan SA 560 mengatur tentang bagaimana auditor mempertimbangkan peristiwa yang terjadi setelah tanggal laporan keuangan <https://pppk.kemenkeu.go.id/in/post/ditemukan-pelanggaran-pada-audit-laporan-keuangan-garuda-izin-ap-kasner-sirumapea-dibekukan>.

Dari fenomena diatas terlihat bahwa saat ini merupakan peradaban yang terkontaminasi korupsi, akuntansi terdistorsi dan terperbudak oleh kepentingan pemilik modal (*stockholder*). Di sini, esensi dan wewenang akuntansi sebagai sarana transparansi dan pertanggungjawaban disalahgunakan untuk satu tujuan, yaitu mengamini keuntungan pemilik modal. Strategi ini mungkin terkadang berhasil dalam meraih keuntungan instan, namun pada hakikatnya, sangat sempit dan meremehkan persepsi publik sebagai entitas yang hanya menerima informasi tanpa kemampuan untuk memilah dan menilai kebenaran yang tercantum dalam laporan keuangan.

Ketika praktik ini terungkap, reputasi yang telah dibangun seiring bertahun-tahun menjadi runtuh tanpa sisa. Kejadian ini menggambarkan betapa sistem akuntansi yang tertanam dalam paradigma kapitalis membawa risiko bencana yang tak terhitung. Sistem akuntansi ini, sejak awal, telah diciptakan untuk mengamankan kepentingan pemilik modal.

Namun, perbedaan mendasar muncul ketika membandingkan sistem akuntansi kapitalis dengan pendekatan Islami. Akuntansi Islami tidak hanya melayani kepentingan *stockholder*, melainkan juga semua stakeholder yang terlibat. Ini melibatkan perlindungan terhadap kepentingan masyarakat secara langsung maupun tidak langsung. Bahkan, lingkungan dan ekosistem flora-fauna yang menjadi bagian integral dari kehidupan juga diakui dalam akuntansi Islami.



Dengan demikian, pendekatan Islami dalam akuntansi tidak hanya mengalihkan fokus dari pemilik modal ke seluruh komunitas yang terlibat, tetapi juga menghargai dan merangkul keberlanjutan alam. Transformasi ini mengilhami nilai-nilai yang berbeda, menandakan upaya sungguh-sungguh untuk membangun sistem akuntansi yang lebih inklusif dan berdaya guna dalam menghadapi tantangan global.

Sebuah peradaban yang menyandarkan ilmu akuntansi pada kepentingan pemilik modal (stockholder) mengilustrasikan kondisi yang kompleks. Ruang lingkup akuntansi sebagai alat transparansi dan pertanggungjawaban tunduk pada manipulasi demi satu tujuan, yaitu memanfaatkan pemilik modal semata. Metode ini mungkin menghasilkan keuntungan sesaat, namun pada hakikatnya, hal ini meremehkan publik sebagai entitas pasif yang hanya dapat menerima informasi tanpa kemampuan untuk menilai kebenaran di balik laporan keuangan. Namun, ketika praktik ini terungkap, reputasi yang telah dibangun dengan susah payah runtuh dengan cepat. Kejadian ini menggambarkan betapa sistem akuntansi dalam paradigma kapitalis membawa risiko bencana yang konstan. Sistem ini, sejak awal, memang diciptakan untuk melayani kepentingan pemilik modal.

Perbedaan yang mencolok muncul ketika membandingkan sistem akuntansi kapitalis dengan pendekatan Islami. Akuntansi Islami tidak hanya mengabdikan pada kepentingan pemegang saham, tetapi juga semua pihak yang terlibat sebagai stakeholder. Hal ini menunjukkan upaya untuk melindungi kepentingan masyarakat, termasuk dunia flora-fauna dan lingkungan tempat mereka hidup. Hal ini membuat Akuntansi Islam melampaui sekadar angka. Ia juga mengukur perilaku dan menggambarkan keseimbangan. Akuntansi Islami menjadi tolok ukur dalam menjaga keteraturan perdagangan, pembagian yang adil, menghindari penipuan dalam kuantitas, memastikan timbangan yang akurat, dan mengawasi untuk mencegah konflik kepentingan yang merugikan. Konsep dasar ini, jika diterapkan secara konsisten, dapat mencegah tragedi seperti yang terjadi pada WorldCom. Ini mungkin terjadi karena akuntansi bukan lagi hanya melayani pemilik modal, tetapi juga mendasari keadilan dan kebenaran.

Nilai-nilai bisnis yang merujuk pada praktik akuntansi Islam sesungguhnya telah diaplikasikan oleh Nabi Muhammad saat membangun Madinah. Tantangannya kini adalah mentransfer nilai-nilai normatif ini ke dalam praktik empiris. Dalam penyusunan akuntansi Islam, mungkin terdapat kesamaan dengan akuntansi konvensional terutama dalam teknik dan operasionalnya. Aspek seperti penggunaan buku besar, sistem pencatatan, dan proses penyusunan mungkin serupa. Namun, perbedaan akan tampak jelas saat membahas substansi laporan, karena mendasar pada filosofi yang berbeda.

Perhatikan bahwa budaya dan nilai-nilai yang mendasari masyarakat Islam dan Barat memiliki perbedaan signifikan. Dalam masyarakat Islam, sistem nilai yang melandasi setiap aktivitas, baik individu maupun kolektif, memiliki peran sentral. Hal ini tidak sejalan dengan masyarakat Barat. Perbedaan budaya dan nilai-nilai ini membentuk bentuk masyarakat, praktik, dan hubungan yang berbeda.

B. Ekonomi Syariah bukan monopoli Islam

Agus (2015) perkembangan bank syariah seiring dengan pesatnya industri perbankan telah terjadi dengan tetap berpegang teguh pada prinsip-prinsip syariah. Bahkan, prospek ke depan bagi perbankan syariah tampak sangat cerah. Lembaga keuangan syariah dengan konsep bagi hasil yang adil bukanlah semata-mata monopoli umat Islam, tetapi memiliki aplikabilitas universal bagi seluruh lapisan masyarakat. Dengan konsep yang universal ini, prinsip-prinsip perbankan syariah dapat diadopsi oleh siapa pun. Di samping itu, hadirnya perbankan syariah memberikan kontribusi yang positif bagi perekonomian nasional.

Namun, dalam perkembangannya, perbankan syariah masih dihadapkan pada berbagai tantangan yang perlu diatasi oleh semua pihak yang terlibat. Beberapa tantangan tersebut meliputi:

1. Peran perbankan syariah secara kuantitatif masih relatif kecil, sehingga pengaruhnya belum dirasakan secara nasional. Total aset milik perbankan syariah hanya menyumbang sekitar 0,33 persen, sementara di Malaysia angkanya sudah mencapai 8 persen.
2. Pelaksanaan praktik nyata perbankan syariah, terutama dalam unit usaha syariah yang dijalankan oleh bank konvensional, masih memunculkan keraguan mengenai sejauh mana kesesuaian dengan prinsip-prinsip syariah. Ada kemungkinan bahwa praktik-praktik perbankan konvensional, seperti penghitungan konvensi bunga, masih berlangsung, tidak memperhatikan prinsip bagi hasil yang bebas dari riba, gharar (ketidakjelasan), dan maisyir (spekulasi). Perbankan syariah juga harus menjauhkan diri dari negative spread.
3. Para ulama belum sepenuhnya memiliki pandangan dan komitmen yang seragam mengenai perbankan syariah, meskipun sudah ada sejumlah fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional MUI.



4. Perbankan syariah membutuhkan dukungan dari masyarakat, terutama dari umat Islam. Namun, dukungan dari pemerintah dan DPR masih belum terlihat jelas, terutama dalam bentuk dasar hukum yang sesuai dengan prinsip syariah. Padahal, perbankan syariah memiliki dasar filosofis dan konseptual yang berbeda secara mendasar dengan perbankan konvensional.

Chapra (2001) menghadapi tantangan-tantangan yang dihadapi oleh perbankan syariah, penting bagi eksistensinya untuk memiliki regulasi yang khusus, seperti Undang-Undang (UU) Perbankan Syariah, yang mengatur aspek-aspek mendasar mengenai perbankan syariah sesuai dengan prinsip syariah sejati. UU ini menjadi semakin mendesak dan diperlukan, mengingat perbedaan nyata dalam praktik perbankan syariah bila dibandingkan dengan perbankan konvensional. Dalam hal ini, nilai-nilai syariah harus menjadi pijakan utama dalam penyusunan ketentuan-ketentuan dalam UU Perbankan Syariah (Nasrullah, 2023).

UU Perbankan Syariah diharapkan mampu menciptakan peluang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat dan meratakan distribusi pendapatan, yang pada gilirannya dapat menghasilkan keadilan ekonomi dalam masyarakat. UU ini juga harus memiliki orientasi internasional, menciptakan manfaat sebanyak-banyaknya baik di tingkat nasional maupun internasional, dan memungkinkan fleksibilitas dalam batasan-batasan yang sesuai dengan prinsip syariah. Dengan adanya UU Perbankan Syariah, diharapkan bahwa lembaga keuangan syariah akan berfungsi lebih baik dan dapat berkontribusi lebih besar dalam mendukung pembangunan ekonomi nasional. Hal ini akan mendorong masyarakat Indonesia menuju kemajuan, kemandirian, dan kesejahteraan yang lebih baik.

KESIMPULAN

Akuntansi terintegrasi Islam memiliki dasar pada prinsip tolong-menolong, yang menghasilkan berbagai perbedaan mendasar dengan akuntansi konvensional yang berakar pada sistem kapitalisme. Peran lembaga keuangan dalam ekonomi konvensional adalah memaksimalkan keuntungan, sementara dalam konteks syariah, peran lembaga keuangan adalah sebagai perantara dalam mencapai pemerataan kekayaan.

Beberapa perbedaan yang signifikan meliputi konsep pinjaman yang dianggap sebagai investasi, penolakan terhadap praktik bunga, serta adopsi sistem pembagian keuntungan antara lembaga keuangan dan pihak peminjam. Karena akuntansi konvensional yang berlaku saat ini berasal dari norma-nilai yang tumbuh dalam masyarakat Barat, maka kerangka konseptual yang menjadi dasar pembentukan standar akuntansi cenderung menguntungkan kelompok kepentingan tertentu.

Laporan keuangan menjadi hasil akhir dari proses akuntansi. Agar informasi keuangan yang disajikan bermanfaat bagi para pengguna, proses penyusunannya harus berdasarkan pada standar akuntansi yang berlaku. Dalam menetapkan standar tersebut, diperlukan dasar teoritis yang dapat diterima secara luas, sehingga standar akuntansi yang diterapkan dapat digunakan untuk mengevaluasi praktik akuntansi yang ada. Dasar teoritis ini disebut kerangka konseptual penyusunan laporan keuangan.

Kegagalan akuntansi konvensional dalam memenuhi harapan masyarakat akan informasi keuangan yang akurat, jujur, dan adil, telah mendorong meningkatnya kesadaran di kalangan intelektual muslim mengenai perlunya pengetahuan akuntansi yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Adanya dorongan untuk merumuskan kembali kerangka konseptual pelaporan keuangan dengan landasan pada kebenaran, kejujuran, dan keadilan menjadi semakin mendesak. Hal ini sesuai dengan semangat akuntansi syariah yang mencerminkan fitrah manusia untuk menjalani kehidupan bermasyarakat dengan etika dan tanggung jawab sosial yang tinggi. Ajaran Islam yang universal mencakup seluruh aspek kehidupan, termasuk akuntansi, yang pada akhirnya membedakan pandangan akuntansi konvensional yang cenderung memprioritaskan pemilik modal (kapitalis), dengan akuntansi syariah yang mengakui nilai manusia dan makhluk lain dalam alam semesta.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus, M., Romdhoni, A. H., & Fitria, N. T. (2015). Perkembangan Bank Syariah Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah STIE-AAS Surakarta*, 1(02).
- Antonio, M. Syafi'i, *Bank Syariah : Wacana Ulama dan Cendekiawan*, Bank Indonesia dan Tazkia Institute, Jakarta, 1999.
- Baydoun, N. & Willet. (1997). *Islam and accounting: Ethical issues in the presentation of financial information*. *Accounting; Commerce & Finance: The Islamic Perspective*, 1(1), 1-25.



- Chapra, Umer, Islam dan Tantangan Ekonomi, terj. Oleh Ikhwan Abidin B, Gema Insani Press dan Tazkia Institute, Jakarta, 2001. Chapra, Umer, The Future of Economic : Landscape Baru Perekonomian Masa Depan, Shariah Economics and Banking Institute (SEBI), Jakarta, 2001.
- Nasrullah Djamil. (2023). Majmu' Hadits Integrasi Ilmu dan Islamisasi Digital. JAWI : Jurnal Ahkam Wa Iqtishad , 1(1), 1–21. Retrieved from <https://naaspublishing.com/index.php/jawi/article/view/9>
- Goddard, A. (2004). Budgetary practices and accountability habitus: A grounded theory. *Accounting, Auditing & Accountability Journal*, 17(4), 543-577
- Ibrahim, S. H. M. (2000). The need for Islamic accounting: Perception of its objective and characteristics by Malaysian accountants and academics (Doctoral dissertation). University of Dundee, United Kingdom.
- Ilyas, Daniel, Sistem Pemikiran Ekonomi Islami, Makalah dalam Diskusi Internal KEI FSI-SMFEUI (tidak dipublikasikan), Jakarta : 2001.
- Kamaruddin, Muhammad Iqmal Hisham and MdAuzair, Sofiah, Integrated Islamic Financial Accountability Model for Islamic Social Enterprise (ISE) (March 29, 2019). *The Journal of Muamalat and Islamic Finance Research*, 16(1), 17-36 (2019), Available at SSRN: <https://ssrn.com/abstract=3412264>
- Lunin, H. M. Djamil, Konsep Akuntansi Syariah, Makalah dalam Diskusi pada seminar Di Bank Indonesia (tidak dipublikasikan), Pekanbaru : 2004.
- Sekaran, Uma dan Roger Bougie, (2017), Metode Penelitian untuk Bisnis: Pendekatan Pengembangan-Keahlian, Edisi 6, Buku 1, Cetakan Kedua

